

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan penelitian yang telah dilakukan serta analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan PPS di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu diawali dengan data pemicu yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP untuk diklarifikasikan KPP kepada Wajib Pajak. Kemudian, strategi utama yang dilakukan KPP agar Wajib Pajak mengikuti PPS adalah dengan melakukan sosialisasi dan intensifikasi. Meskipun secara keseluruhan pelaksanaan PPS berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi KPP antara lain sedikitnya data yang harus diklarifikasi, jumlah Wajib Pajak yang ditargetkan mengikuti PPS tidak banyak, serta keterbatasan akses data oleh pihak KPP karena pemberlakuan *self assessment system*. Sedangkan kendala yang dihadapi Wajib Pajak adalah adanya penyampaian informasi yang kurang jelas dan sulit dimengerti dalam pengungkapan harta berupa surat berharga dan/atau SBN.

2. Pelaksanaan PPS justru dapat menurunkan kepercayaan Wajib Pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penerapan kebijakan PPS tidak lepas dari kendali politik dalam negara yang dapat mengalahkan ideologi ekonomi yang menyatakan bahwa PPS seharusnya bersifat *one-time*. PPS juga dikhawatirkan tidak akan mendidik dan justru membuat Wajib Pajak menjadi manja. Sementara dari sisi Wajib Pajak, PPS dan kebijakan serupa merupakan kesempatan untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dilaporkan sebelumnya. Kesempatan tersebut mampu memberikan rasa nyaman dan tenang karena Wajib Pajak merasa menjadi lebih terbuka terkait kewajiban perpajakannya.
3. Secara keseluruhan, pelaksanaan PPS tidak berdampak signifikan terhadap laju pertumbuhan realisasi kepatuhan dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan PPS tidak efektif untuk meningkatkan kepatuhan maupun penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang diteliti, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan terkait pelaksanaan PPS, antara lain:

1. Pemerintah sebaiknya lebih mempertimbangkan dan mempersiapkan strategi lanjutan atas kebijakan pengampunan pajak di masa mendatang. Berkaca dari kebijakan-kebijakan sebelumnya, pengampunan pajak yang tidak diikuti strategi lanjutan tidak mampu mendidik Wajib Pajak tetapi menumbuhkan sifat manja.

2. Pihak DJP bisa mengembangkan dan memperbaiki sistem aplikasi agar pegawai dapat mengakses data yang dimasukan Wajib Pajak secara daring, sehingga pengawsan dapat dilaksanakan lebih intensif dan optimal.
3. Pembuat kebijakan sebaiknya melaksanakan evaluasi atas penerapan kebijakan PPS, sehingga kekurangan atau kesalahan dapat diperbaiki dan diminimalisasi apabila ada kebijakan serupa di masa mendatang.